



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 20 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PIKET SABTU DANMINGGU UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK BIDANG JASA TRANSPORTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 189 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016, telah dilakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu dengan dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan jasa transportasi yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan siap melayani serta menjamin keselamatan dan keamanan, maka perlu dilaksanakan piket Sabtu dan Minggu dalam rangka pemantauan pelayanan publik di bidang jasa transportasi, bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tata kerja dan pelaporan;

- c. bahwa dalam rangka peningkatan jangkauan lokasi di wilayah terluar, terdepan dan rawan bencana serta mengoptimalkan capaian tujuan pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu, perlu dilakukan revisi atas Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);
8. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Staf Ahli Menteri;
 7. Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama Kantor Pusat;
dan
 8. Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator Kantor Pusat.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan kegiatan Piket Sabtu dan Minggu melalui pengamatan dan pemantauan langsung, evaluasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan pelayanan publik bidang jasa transportasi di unit kerja Pemerintahan Pusat, Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota guna mengidentifikasi berbagai permasalahan berkaitan dengan pelayanan publik serta untuk mengevaluasi kebijakan transportasi dan memberikan informasi perkembangan terkini terkait dengan kebijakan teknis Kementerian Perhubungan, sebagaimana

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Perhubungan ini.

KEDUA : Kegiatan sebagaimana Diktum PERTAMA, yang menjadi tugas, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan aksi peninjauan/monitoring ke unit kerja pelayanan publik di bawah Kementerian Perhubungan, meliputi pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal angkutan darat;
2. Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator melaksanakan PISAMI pada Prasarana dan Sarana Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Perhubungan ini;
3. Melaksanakan aksi pemantauan sistem operasional dan prosedur, serta penilaian pemberian pelayanan publik bidang jasa transportasi;
4. Melaksanakan aksi pendokumentasian atas hasil evaluasi kepuasan dan keluhan masyarakat pengguna pelayanan publik bidang jasa transportasi dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur/Eselon II;
5. Melaksanakan aksi interaksi dengan pengguna langsung pelayanan publik bidang jasa transportasi;
6. Melaksanakan aksi perbaikan pelayanan publik bidang jasa transportasi;
7. Melaksanakan aksi langsung untuk memberikan berbagai saran dan masukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik bidang jasa transportasi, dan dilarang menggunakan bantuan serta fasilitas operasional dari unit kerja yang dituju;
8. Penerapan peraturan perundang-undangan bidang transportasi di masing-masing unit kerja yang bersangkutan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan PISAMI semua pejabat yang ditunjuk dapat didampingi oleh staf, apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan maka dapat menunjuk pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan PISAMI dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengamatan dan pemantauan langsung kegiatan tersebut kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan batas waktu pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan PISAMI dengan menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (pptb@dephub.go.id) format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Perhubungan ini.
- KEENAM : Apabila sampai dengan batas 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan PISAMI hasil laporan Petugas PISAMI belum disampaikan kepada Menteri sebagaimana Instruksi pada Butir lima di atas, maka Sekretaris Jenderal cq. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk segera menyampaikan laporan dimaksud.
- KETUJUH : Dengan diberlakukannya Instruksi Menteri Perhubungan ini, maka Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

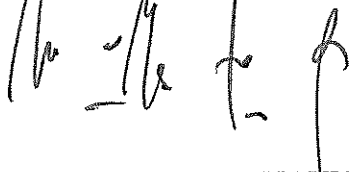
BUDI KARYA SUMADI

Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama Kantor Pusat dan Sekolah Tinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator Kantor Pusat dan Sekolah Tinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I

Instruksi Menteri Perhubungan Republik
Indonesia

Nomor : IM 20 TAHUN 2016

Tanggal : 24 November 2016

NO.	JABATAN	WAKTU	LOKASI
1	Menteri Perhubungan	3-4 Desember 2016	ACEH JAYA - NAD
2	Sekretaris Jenderal	19-20 November 2016	MANOKWARI - PAPUA BARAT
3	Inspektur Jenderal	17-18 Desember 2016	SAMBAS - KALBAR
4	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	26-27 November 2016	ENTIKONG - KALBAR
5	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	3-4 Desember 2016	BERAU - KALTIM
6	Direktur Jenderal Perhubungan Udara	10-11 Desember 2016	TARAKAN - KALTARA
7	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan	17-18 Desember 2016	MANGGARAI BARAT - NTT
8	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan	19-20 November 2016	LAMPUNG SELATAN - LAMPUNG
9	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan dan Perlengkapan	3-4 Desember 2016	SORONG - PAPUA BARAT
10	Kepala Biro Kerja Sama	26-27 November 2016	ALOR - NTT
11	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama	3-4 Desember 2016	LOMBOK BARAT - NTB
12	Kepala Biro Hukum	10-11 Desember 2016	BANYUWANGI - JATIM
13	Kabag Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda Biro Hukum	26-27 November 2016	BELITUNG - KEP. BABEL
14	Kepala Biro Umum	17-18 Desember 2016	SUMBA TIMUR - NTT

NO.	JABATAN	WAKTU	LOKASI
15	Kabag Tata Usaha Kementerian Biro Umum	26-27 November 2016	ENTIKONG - KALBAR
16	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	10-11 Desember 2016	HALMAHERA UTARA - MALUT
17	Kabag Media Massa dan Opini Publik Biro Komunikasi dan Informasi Publik	3-4 Desember 2016	ASMAT - PAPUA
18	Kepala Biro Perencanaan	17-18 Desember 2016	KUPANG - NTT
19	Kepala Bagian Rencana Biro Perencanaan	10-11 Desember 2016	TARAKAN - KALTARA
20	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	19-20 November 2016	ENDE - NTT
21	Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi	19-20 November 2016	MANOKWARI - PAPUA BARAT
22	Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	17-18 Desember 2016	LABUAN BAJO - NTT
23	Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi PPTB	26-27 November 2016	BARRU - SULSEL
24	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	10-11 Desember 2016	SAMARINDA - KALTIM
25	Kabag Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat	26-27 November 2016	KAUR - BENGKULU
26	Direktur Prasarana Perhubungan Darat	17-18 Desember 2016	PALANGKARAYA - KALTENG
27	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan Dit. Prasarana Hubdat	3-4 Desember 2016	ACEH JAYA - NAD
28	Kepala Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan Dit. Prasarana Hubdat	19-20 November 2016	LAMPUNG SELATAN - LAMPUNG

NO.	JABATAN	WAKTU	LOKASI
29	Kepala Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dit. Prasarana Hubdat	10-11 Desember 2016	BENGKALIS - RIAU
30	Sekretaris Inspektorat Jenderal	3-4 Desember 2016	ATAMBUA - NTT
31	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	3-4 Desember 2016	SORONG - PAPUA BARAT
32	Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan laut	10-11 Desember 2016	BANYUWANGI - JATIM
33	Kabag Keuangan Setditjen Perhubungan laut	17-18 Desember 2016	SUMBA TIMUR - NTT
34	Direktur Kepelabuhanan	3-4 Desember 2016	ACEH JAYA - NAD
35	Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Dit.Kepelabuhanan	26-27 November 2016	ALOR - NTT
36	Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal Dit.Kepelabuhanan	19-20 November 2016	SUMBAWA - NTB
37	Kasubdit Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dit.Kepelabuhanan	17-18 Desember 2016	LABUAN BAJO - NTT
38	Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Dit.Kepelabuhanan	17-18 Desember 2016	MANGGARAI BARAT - NTT
39	Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan Dit.Kepelabuhanan	3-4 Desember 2016	KENDARI - SULTRA
40	Direktur Perkapalan dan Kepelautan	26-27 November 2016	BARRU - SULSEL
41	Kasubdit Keselamatan Kapal Dit. Kapel	10-11 Desember 2016	HALMAHERA UTARA - MALUT
42	Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan Dit. Kapel	17-18 Desember 2016	KUPANG - NTT
43	Direktur Kenavigasian	19-20 November 2016	BITUNG - SULUT

NO.	JABATAN	WAKTU	LOKASI
44	Kepala Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran Dit. Kenavigasian	10-11 Desember 2016	BIMA - NTB
45	Kepala Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan Dit. Kenavigasian	10-11 Desember 2016	GUNUNG SITOLI - SUMUT
46	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian Direktorat Kenavigasian	19-20 November 2016	KUTAI TIMUR - KALTIM
47	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan laut	3-4 Desember 2016	LOMBOK BARAT - NTB
48	Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Dit. LALA	17-18 Desember 2016	NABIRE - PAPUA
49	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut Dit. LALA	3-4 Desember 2016	MERAUKE - PAPUA
50	Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut Dit. LALA	10-11 Desember 2016	KAIMANA - PAPUA BARAT
51	Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri Dit. LALA	19-20 November 2016	LUWUK - SULTENG
52	Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	3-4 Desember 2016	ASMAT - PAPUA
53	Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air Dit. KPLP	17-18 Desember 2016	BAU BAU - SULTRA
54	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Dit. KPLP	26-27 November 2016	GORONTALO UTARA - GORONTALO
55	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Dit. KPLP	3-4 Desember 2016	ROKAN HILIR - RIAU
56	Kepala Subdirektorat Patroli dan Pengamanan Dit. KPLP	3-4 Desember 2016	ATAMBUA - NTT
57	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	3-4 Desember 2016	KENDARI - SULTRA
58	Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara	10-11 Desember 2016	SAMARINDA - KALTIM

NO.	JABATAN	WAKTU	LOKASI
59	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Setditjen Perhubungan Udara	17-18 Desember 2016	NABIRE - PAPUA
60	Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Setditjen Perhubungan Udara	17-18 Desember 2016	PALANGKARAYA - KALTENG
61	Kepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara	3-4 Desember 2016	JAYAPURA DAN WAMENA - PAPUA
62	Direktur Bandar Udara	26-27 November 2016	BELITUNG - KEP. BABEL
63	Kepala Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara Direktorat Bandar Udara	10-11 Desember 2016	KAIMANA - PAPUA BARAT
64	Kepala Subdirektorat Tatanan K bandarudaraan dan Lingkungan Direktorat Bandar Udara	19-20 November 2016	KUTAI TIMUR - KALTIM
65	Kepala Subdirektorat Prasarana Bandar Udara Direktorat Bandar Udara	3-4 Desember 2016	BERAU - KALTIM
66	Kepala Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara Direktorat Bandar Udara	19-20 November 2016	MAUMERE - NTT
67	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara Direktorat Bandar Udara	3-4 Desember 2016	ACEH JAYA - NAD
68	Direktur Keamanan Penerbangan	3-4 Desember 2016	MERAUKE - PAPUA
69	Kasubdit Kendali Mutu Keamanan Penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan	17-18 Desember 2016	SAMBAS - KALBAR
70	Kasubdit PPNS dan Personel Keamanan Penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan	19-20 November 2016	ENDE - NTT
71	Kepala Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan Kargo dan Barang Berbahaya Direktorat Keamanan Penerbangan	10-11 Desember 2016	GUNUNG SITOLI - SUMUT
72	Kepala Subdirektorat Standardisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan	26-27 November 2016	GORONTALO UTARA - GORONTALO

NO.	JABATAN	WAKTU	LOKASI
73	Direktur Angkutan Udara	3-4 Desember 2016	JAYAPURA DAN WAMENA - PAPUA
74	Kasubdit Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara Direktorat Angkutan Udara	19-20 November 2016	MAUMERE - NTT
75	Kepala Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Direktorat Angkutan Udara	10-11 Desember 2016	BENGGALIS - RIAU
76	Kepala Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara Direktorat Angkutan Udara	26-27 November 2016	KAUR - BENGKULU
77	Kepala Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Tarif Jasa Angkutan Udara Direktorat Angkutan Udara	26-27 November 2016	SUMBAWA - NTB
78	Direktur Navigasi Penerbangan	10-11 Desember 2016	TOLI TOLI - SULTENG
79	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan	17-18 Desember 2016	BAU BAU - SULTRA
80	Kepala Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan	19-20 November 2016	LUWUK - SULTENG

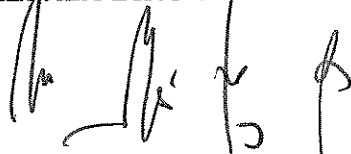
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II

Instruksi Menteri Perhubungan
Republik Indonesia

Nomor : Im 20 Tahun 2016

Tahun : 24 November 2016

Contoh I Format Outline Laporan PISAMI

1. Dasar Kegiatan;
2. Lokasi (Objek Pengamatan);
3. Waktu dan Petugas Pelaksana;
4. Hasil Pengamatan:
 - a. Pelayanan yang dilakukan pada objek pengamatan;
 - b. Prasarana:
 - 1) jenis prasarana
 - 2) spesifikasi prasarana
 - 3) kondisi prasarana
 - 4) program pengembangan
 - c. Sarana:
 - 1) jenis sarana
 - 2) spesifikasi sarana
 - 3) kondisi sarana
 - d. Sumber Daya Manusia:
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP)/ Manajemen/ Pelayanan.
5. Permasalahan;
6. Saran.

LAPORAN PELAKSANAAN
PIKET SABTU DAN MINGGU PELAYANAN PUBLIK
BIDANG JASA TRANSPORTASI

1. Dasar Kegiatan Perjalanan Dinas

- a. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu untuk Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Surat Perintah Tugas.....

2. Lokasi

Kegiatan Piket Sabtu Minggu dilaksanakan dikabupaten propinsi dengan konsentrasi objek pengamatan sebagai berikut:

- a. Bandar Udara
- b. Pelabuhan Laut
- c. Terminal

Dst

3. Waktu dan Petugas Pelaksanaan

Kegiatan Piket Sabtu dan Minggu dilaksanakan pada tanggals.dbulan 2016, dan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Pengikut:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

4. Hasil Pengamatan

a. Bandara

1. Fasilitas Sisi Udara
 - o Taxiway (... x ...) kondisi....
 - o Apron (... x ...) kondisi....
 - o Runway Strip (... x ...) kondisi....
 - o RESA (... x ...) kondisi....
 - o dst
2. Fasilitas Sisi Darat
 - o terminal penumpang (... x ...) kondisi....
 - o Jalan masuk (... x ...) kondisi....
 - o Tempat parkir (... x ...) kondisi....
 - o Gedung kargo (... x ...) kondisi....
 - o Kantor (... x ...) kondisi....
 - o dst
3. Fasilitas navigasi penerbangan
4. Fasilitas bantu pendaratan
5. Fasilitas komunikasi penerbangan.....
6. Jumlah naik/turun penumpang atau cargo atau pesawat
7. Jumlah SDM sebanyak orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - o Avsec sebanyak
 - o PKPPK sebanyak
 - o dst
8. Operator penerbangan yang beroperasi di Bandarasebanyak..... maskapai yang meliputi : dengan rute
9. Rencana Pengembangan di bandara pada tahun adalah.....
10. Permasalahan yang terdapat di Bandara meliputi :
 -
 -
11. Adapun saran yang dapat diberikan terkait pelayanan di bandara adalah sebagai berikut:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst

b. Pelabuhan

1. Fasilitas Sisi Laut
 - o Dermaga (... x ...) kondisi....
 - o Kolam Pelabuhan (... x ...) kondisi....
 - o Dst

2. Fasilitas Sisi Darat
 - o terminal penumpang (... x ...) kondisi....
 - o Jalan masuk (... x ...) kondisi....
 - o Tempat parkir (... x ...) kondisi....
 - o Kantor (... x ...) kondisi....
 - o dst
3. Fasilitas navigasi Pelayaran.....
4. Jumlah naik/turun penumpang atau cargo atau kapal
5. Jumlah SDM sebanyak orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - o sebanyak
 - o sebanyak
 - o dst
6. Rencana Pengembangan di Pelabuhan.... pada tahun adalah.....
7. Permasalahan yang terdapat di Pelabuhan..... meliputi :
 -
 -
 -
8. Adapun saran yang dapat diberikan terkait pelayanan di Pelabuhan adalah sebagai berikut:
 - 4)
 - 5)
 - 6) dst

c. Terminal.....

1. Fasilitas Terminal
 - o Ruang Tunggu Penumpang (... x ...) kondisi
 - o terminal penumpang (... x ...) kondisi....
 - o Jalan masuk (... x ...) kondisi....
 - o Tempat parkir (... x ...) kondisi....
 - o Kantor (... x ...) kondisi....
 - o Fasilitas umum lainnya.....
 - o dst
2. Jumlah naik/turun penumpang atau cargo atau kapal
3. Jumlah SDM sebanyak orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - o sebanyak
 - o sebanyak
 - o dst
4. Rencana Pengembangan di terminal.... pada tahun adalah.....
5. Permasalahan yang terdapat di Terminal..... meliputi :
 -
 -
 -
 -

6. Adapun saran yang dapat diberikan terkait pelayanan di Terminal adalah sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Jakarta, Bulan 2016
Pelaksana Kegiatan

Nama Pejabat
Pangkat/ Golongan
NIP


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001